



Analisis Efektivitas Bantuan Luar Negeri: Development Aid China pada Proyek Hydropower Bui Dam di Ghana

Prinailla Reinata Satriani ^{1*}

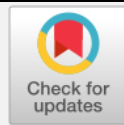
¹ Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya, 65145, Malang-Indonesia

*Korespondensi: reinatasatriani@student.ub.ac.id

INFO ARTIKEL

Info Publikasi:

Research Article



Tanggal Terbit:

30 September 2024



Artikel dengan akses terbuka

Hak Cipta© 2024 dimiliki oleh Penulis, dipublikasi oleh Journal of Politics and Democracy

Lisensi: Attribution-Non Commercial-ShareAlike (CC BY-NC-SA)

Cantuman Sitasi:

Satriani, P. R.. (2024). Analisis Strategi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dalam Mencegah Pelanggaran Netralitas ASN Pada Pemilhan Umum 2024. *Journal of Politics and Democracy*, 4(1), 27-45. <https://doi.org/10.61183/polikrasi.v4i1.84>

ABSTRAK

China merupakan salah satu negara pemberi bantuan luar negeri terbesar di negara-negara Afrika, salah satunya Ghana. China memberikan bantuan pendanaan pada proyek hydropower bendungan Bui, yang saat ini telah menghasilkan 730 gigawatt/jam dan menjadi irigasi pertanian kurang lebih 30.000 hektar. Meskipun demikian, ketika masa pembangunannya proyek ini mengharuskan warga Ghana yang tinggal di sekitar Bui untuk pindah pemukiman serta adanya permasalahan dengan tenaga kerja dari Ghana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas bantuan luar negeri China dalam proyek hydropower bendungan Bui di Ghana dengan berbagai kontroversi yang ada. Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif sebagai metode penelitian untuk menjawab pertanyaan besar dari penelitian. Dengan hasil penelitian demikian, proyek bendungan Bui termasuk cukup efektif dalam efektivitas bantuan luar negeri yang berpijak pada prinsip Paris Declaration, namun tetap memperlihatkan ruang untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam hal transparansi, hak buruh, dan pengawasan proyek.

China is one of the largest providers of foreign aid to African countries, one of which is Ghana. China provided funding assistance for the Bui dam hydropower project, which currently produces 730 gigawatts/hour and provides agricultural irrigation for approximately 30,000 hectares. However, during the construction period, this project required Ghanaians living around Bui to move their settlements and there were problems with workers from Ghana. This research aims to analyze the effectiveness of China's foreign assistance in the Bui dam hydropower project in Ghana with various existing controversies. The author uses descriptive qualitative methods as a research method to answer the big research questions. With the results of such research, the Bui dam project is quite effective in terms of the effectiveness of foreign aid based on the principles of the Paris Declaration, but still shows room for continuous improvement in terms of transparency, labor rights and project



monitoring.

Kata Kunci: Bantuan Luar Negeri, Bantuan Pembangunan, Bendungan Bui, China, Ghana

1. Pendahuluan

China telah diketahui sebagai mitra dagang terbesar dan konsumen kedua terbesar dari sumber daya Afrika sejak awal tahun 2000an dengan investasi terkini sejumlah 300 juta dollar AS (Ministry of Commerce (MOFCOM), 2020). Bantuan luar negeri China yang berada di Afrika sendiri berfokus pada pendanaan proyek infrastruktur yang dibangun oleh perusahaan-perusahaan China. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan China, pihak swasta China terhitung 90% dari total angka perusahaan China yang berinvestasi di Afrika dan 70% nilai dari Foreign Direct Investment (FDI) China (Ministry of Commerce (MOFCOM), 2020). China melalui kerja sama ekonomi yang sukses telah memberikan dukungan material, teknis, dan moral bagi gerakan pembebasan Afrika selama periode pasca-kolonial dan pembongkaran apartheid. China dan Ghana sendiri memiliki sejarah hubungan yang panjang, diawali dari tahun 1960 ketika kedua negara membangun hubungan diplomatik pertamanya di bawah pemerintahan Mao Zedong dan Dr. Kwame Nkrumah (Odoom, 2015). Dengan ini dapat dilihat bahwa Ghana merupakan negara Afrika Sub-Sahara pertama yang melakukan kerja sama diplomatik dengan China yang dilandasi oleh kerangka kerja Kerja sama Selatan-Selatan dari Konferensi Asia-Afrika, Bandung 1955. Hubungan keduanya juga semakin diperdalam dengan perjuangan bersama melawan hegemoni Barat dan neo-imperialisme. Selama satu setengah dekade terakhir, Ghana telah menyediakan dukungan diplomatis terhadap China, dan dibalasnya dengan dukungan material substansial untuk pengembangan negara. China telah memberikan berbagai bantuan pengembangan sesuai dengan kapasitasnya yang biasanya dalam bentuk hibah, pinjaman, dan bantuan teknis (Amo-Agyemang, 2021; 4).

Lebih jauh lagi, kerja sama China-Ghana di bidang ekonomi dan perdagangan bilateral telah meningkat secara signifikan selama bertahun-tahun. Investasi China yang mengalir ke Ghana dalam beberapa dekade terakhir cukup memberikan pelajaran. Misalnya, kolom perdagangan bilateral telah meningkat menjadi US\$ 66,4 miliar sementara sejumlah proyek investasi China yang baru terdaftar menduduki puncak daftar Investasi Asing Langsung (FDI) Ghana pada tahun 2016. Pemerintah China telah terlibat dalam pertukaran dan kerja sama dengan Ghana di bidang kebudayaan, pendidikan, kesehatan medis, perdagangan, infrastruktur, dan telekomunikasi. Meningkatnya permintaan listrik memerlukan perluasan sistem tenaga listrik secara besar-besaran di Afrika sub-Sahara. Kapasitas pembangkit listrik diperkirakan akan berlipat ganda dalam dua puluh tahun ke depan, dengan energi terbarukan mencakup tiga perempat pembangkit listrik baru, yang sebagian besar berasal dari tenaga surya, air, dan angin (IEA, 2020). Mengingat kekurangan energi yang terus berlanjut di sebagian besar negara Afrika, China menawarkan bantuan luar negerinya kepada negara-negara Afrika, salah satunya Ghana, berupa investasi pada sektor listrik. Ada beberapa proyek yang dipilih oleh China, seperti proyek energi angin Adama di Ethiopia, proyek Garissa di Kenya dan salah satunya adalah proyek energi air bendungan Bui di Ghana (Lema, 2021; 5). Model investasi utama didasarkan pada pinjaman preferensial dan kredit ekspor yang diberikan kepada pengembang proyek. Selain itu, investasi berbasis ekuitas langsung, pinjaman komersial dan hibah juga disediakan, khususnya dari lembaga keuangan yang terlibat (Lema, 2021; 6).

Investasi China pada bendungan pembangkit listrik tenaga air Bui di Ghana, yang akan dibahas nanti, berjumlah USD 622 juta, yang terdiri dari USD 60 juta dari pemerintah Ghana, dan sisa biaya proyek disediakan oleh China Exim Bank dalam bentuk konsesi. pinjaman sebesar USD 263,5 juta dan pembeli kredit sebesar USD 298,5 juta (Hensengerth, 2018). Proyek bendungan Bui di Ghana ini menjadi bagian penting dari strategi pasokan listrik Ghana dengan tujuan untuk mendiversifikasi pertumbuhan ekonomi dari Selatan ke Utara. Dengan kapasitas terpasang sebesar 400MW, bendungan ini menghasilkan 730 gigawatt/jam pada tahun 2014 (Komisi Energi Ghana 2015). Bendungan Bui tertanam kuat dalam wacana pasokan energi yang dapat diandalkan untuk pertumbuhan ekonomi serta pertumbuhan ramah lingkungan. Meskipun fakta demikian, proyek pembangunan bendungan ini menuai kontroversi dan kritik. Lokasinya yang kontroversial di Sungai Black Volta yang membanjiri sebagian besar Taman Nasional Bui hingga fakta bahwa proyek bantuan China ini mengabaikan dimensi kemanusiaan dan sebagai konsekuensinya masalah keadilan sosial di mana banyaknya warga Ghana yang harus pindah dari pemukiman aslinya akibat pembangunan ini. Bacaan ini akan membahas efektivitas dari proyek bendungan Bui di Ghana sebagai bentuk dari bantuan luar negeri China beserta kritik yang dapat dijadikan evaluasi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada analisis efektivitas bantuan luar negeri China melalui proyek pembangunan Bendungan Bui di Ghana. Pertanyaan utama yang ingin dijawab adalah sejauh mana proyek ini mampu memenuhi prinsip efektivitas bantuan pembangunan, khususnya dalam kerangka Paris Declaration on Aid Effectiveness yang menekankan kepemilikan kebijakan, keselarasan, harmonisasi, manajemen berbasis hasil, dan akuntabilitas bersama. Fokus analisis diarahkan tidak hanya pada kontribusi proyek ini terhadap pasokan energi nasional dan pembangunan ekonomi Ghana, tetapi juga pada dampak sosial yang muncul, seperti relokasi penduduk, kondisi ketenagakerjaan, dan transparansi pengelolaan proyek. Dengan menempatkan Bui Dam sebagai studi kasus, penelitian ini bertujuan untuk menilai capaian sekaligus keterbatasan bantuan luar negeri China dalam praktiknya, serta memberikan evaluasi kritis terhadap implikasi kebijakan bagi Ghana maupun bagi pola kerja sama pembangunan Selatan-Selatan secara lebih luas.

2. Metode Penelitian

Metode penelitian ini didasarkan pada analisis beberapa studi literatur terhadap efektivitas bantuan luar negeri, beserta faktor yang mempengaruhinya. Contohnya adalah efektivitas bantuan luar negeri yang diterima oleh Nigeria dan bagaimana bantuan tersebut berdampak pada tingkat lokal di negaranya (Kotsadam, A., et. al., 2018). Contoh lainnya adalah kisah sukses dari efektivitas bantuan luar negeri yang diterima oleh Botswana (Maipose, G., 2009). Negara-negara di Afrika cenderung akan terjebak pada hutang apabila menerima bantuan luar negeri, khususnya dalam bentuk pinjaman. Namun, kedua studi literatur ini, khususnya kisah Botswana, menyoroti bahwasannya keberhasilan bantuan luar negeri yang diberikan oleh negara donor adalah kebijakan yang baik di negara recipient. Hal ini telah mendorong akumulasi yang cepat, investasi, dan eksploitasi sumber daya alam yang efisien secara sosial. Kebijakan-kebijakan ini dihasilkan oleh serangkaian institusi yang mendorong investasi dan pembangunan ekonomi (Maipose, G., 2009; 113). Terlepas dari kisah keberhasilan tersebut, juga adanya fakta bahwa adanya ketidakmerataan distribusi bantuan, khususnya ke daerah-daerah termiskin sehingga menunjukkan bahwa bantuan tersebut tidak seefektif mungkin dalam mengurangi kemiskinan (Briggs, R.C., 2017). Dengan demikian, metode penelitian penelitian ini

adalah metode deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mengacu pada penggunaan data sekunder, seperti analisis dokumen yang ada baik data dari China, Ghana, maupun jurnal penelitian. Penelitian ini juga menggunakan penelitian deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan efektivitas bantuan luar negeri China di Ghana melalui proyek bendungan Bui melalui kerangka konseptual yang telah dijelaskan.

3. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Bantuan Luar Negeri China melalui Proyek Bendungan Bui di Ghana

Studi ini akan mengeksplorasi empat karakteristik utama bantuan China dalam proyek bendungan Bui di Ghana menurut Teori Bantuan Lancaster gagasan, institusi, kepentingan, dan organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk menjelaskan bentuk bantuan luar negeri yang China berikan kepada Ghana serta dilanjutkan analisis efektivitasnya

A. Ideas (Gagasan)

Sejak didirikan pada tahun 1949, Republik Rakyat China selalu menunjukkan semangat internasionalisme dan kemanusiaan dengan mengikuti dan mendukung upaya negara-negara berkembang lainnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dan mencapai pembangunan. Sejak awal, meskipun China kekurangan dana, China mulai menawarkan bantuan kepada negara-negara yang membutuhkan untuk mendukung perjuangan mereka demi kemerdekaan dan pembebasan nasional, serta upaya mereka untuk mendorong pembangunan ekonomi dan sosial, yang meletakkan dasar yang kokoh bagi pembangunan jangka panjang, persahabatan dan kerja sama dengan negara-negara tersebut.

Setelah meluncurkan reformasi dan keterbukaan pada tahun 1978, China telah memberikan lebih banyak bantuan kepada negara-negara berkembang lainnya dalam bentuk yang lebih beragam untuk meningkatkan pembangunan bersama (Embassy of PRC in the Republic of Zimbabwe, 2021). Dengan masuknya Kongres Nasional Partai Komunis China ke-18, terjadinya sedikit pergeseran gagasan di mana China memasuki era barunya di tahun 2012. Presiden Xi Jinping telah mempertimbangkan tanggung jawab China dari perspektif global, dan mengusulkan visi komunitas global dengan masa depan bersama Belt and Road Initiative.

China berkomitmen untuk mengupayakan kebaikan yang lebih besar dan kepentingan bersama, serta menjunjung tinggi prinsip ketulusan, hasil nyata, kedekatan, dan itikad baik dalam mengembangkan hubungan dengan negara-negara berkembang lainnya serta prinsip persahabatan, ketulusan, saling menguntungkan, dan inklusivitas dalam memperluas hubungan dengan negara-negara tetangga (Embassy of PRC in the Republic of Zimbabwe, 2021).

Untuk mencapai tujuan ini, Presiden Xi telah memanfaatkan banyak kesempatan internasional untuk mengumumkan serangkaian langkah bantuan luar negeri yang berbentuk kerja sama. Hal ini menyajikan pendekatan China, menawarkan visinya, dan menyumbangkan kekuatannya untuk menyelesaikan masalah pembangunan global dan melaksanakan Agenda Sustainable Development 2030 PBB. China juga meningkatkan bantuan luar negerinya menjadi model kerja sama pembangunan internasional, mengambil inisiatif baru dan mencapai hasil yang lebih besar di era baru ini.

Tingkat interkoneksi dan saling ketergantungan antar negara yang belum pernah terjadi sebelumnya mengikat mereka ke dalam komunitas global dengan masa depan bersama. Dipandu oleh visi ini, kerja sama pembangunan internasional China di era baru memiliki landasan filosofis yang lebih mendalam dan tujuan yang lebih jelas, yang mengarah pada

tindakan yang lebih konkrit. China memiliki landasan budaya dan karakter nasional yang sangat mementingkan itikad baik, persahabatan, keadilan dan kebenaran. Hal ini merupakan kekuatan inheren yang mendorong kerja sama pembangunan China, yang didasarkan pada gagasan berikut:

a. Cita-cita keharmonisan universal bangsa China.

China mengupayakan dunia ideal di mana Jalan Agung mengatur demi kebaikan bersama, menghormati prinsip-prinsip bertetangga yang baik dan keharmonisan dalam hubungan dengan negara lain, serta menganjurkan kerja sama dan saling membantu. Berakar kuat pada budaya China, inilah keyakinan kuat yang menginspirasi kerja sama pembangunan China. Menjunjung tinggi keyakinan bahwa semua negara adalah anggota desa global dengan masa depan bersama, China menganjurkan hubungan internasional yang lebih adil dan setara, serta terus berkontribusi terhadap pembangunan global.

b. Gagasan China untuk membalas kebaikan dengan kebaikan.

Rakyat China akan selalu mengingat dukungan dan bantuan yang telah diterima China dari negara-negara lain dan organisasi internasional. Budaya Tionghoa mengagumi mereka yang membalas budi dengan setetes air yang membutuhkan dengan mata air yang sesungguhnya. China bersedia membagikan pengalaman suksesnya tanpa syarat untuk meningkatkan pembangunan di tempat lain dan memberikan manfaat bagi lebih banyak negara dan masyarakat.

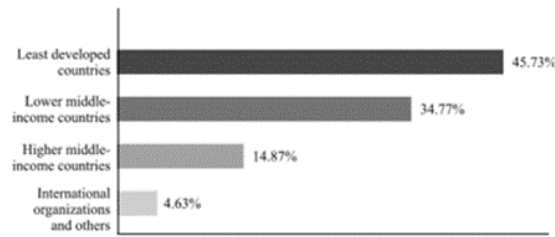
c. Tradisi internasionalisme China.

Selama tujuh dekade terakhir, bangsa China telah bergerak maju, keluar dari kemiskinan dan keterbelakangan menuju kekuatan dan kemakmuran. Rakyat China berharap bahwa masyarakat lain juga akan menjalani kehidupan yang lebih baik sementara kehidupan mereka membaik, dan bersedia memberikan kontribusi sebanyak yang mereka bisa terhadap upaya negara-negara berkembang lainnya untuk memenuhi aspirasi rakyatnya akan kehidupan yang lebih baik.

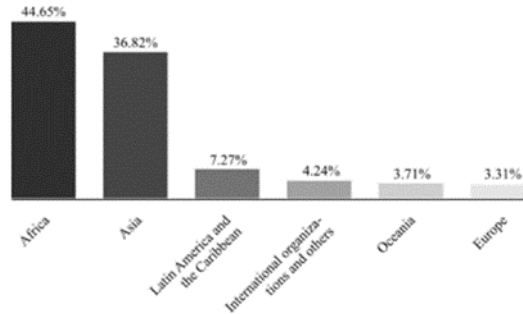
d. Rasa tanggung jawab China sebagai negara besar.

China menganggap terlibat aktif dalam kerja sama pembangunan sebagai anggota komunitas internasional yang bertanggung jawab merupakan suatu kewajiban. China menganggapnya sebagai misi untuk berkontribusi lebih banyak kepada kemanusiaan. Harapannya adalah untuk menawarkan lebih banyak barang publik kepada komunitas internasional dan bekerja sama dengan negara lain untuk membangun masa depan bersama yang lebih baik.

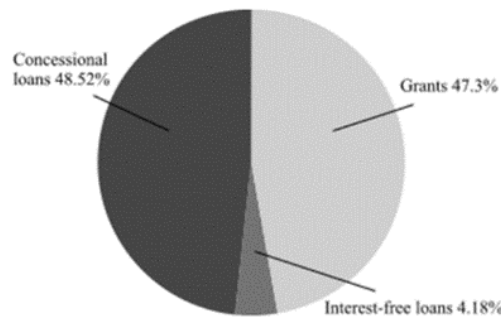
Ini semua adalah puncak dari gagasan bantuan China di abad ke-21, sejalan dengan meningkatnya status China menjadi negara adidaya ekonomi. Namun, China masih menggambarkan dirinya sebagai negara berkembang dan bantuan yang diberikan China adalah 'kerangka bantuan selatan ke selatan', di mana China memberikan bantuan kepada sesama negara berkembang (China's Foreign Aid, 2014; 6). Intinya, China memandang bantuan sebagai alat untuk membangun hubungan perdagangan dengan negara-negara penerima, di mana infrastruktur memainkan peran penting dalam memastikan kelancaran jalur perdagangan dengan negaranya.



Gambar 1. Grafik penerima bantuan luar negeri China berdasarkan kelas pendapatan.



Gambar 2. Grafik penerima bantuan luar negeri China berdasarkan kawasan negara.



Gambar 3. Grafik bentuk pemberian bantuan luar negeri China tahun 2013-2018.

Dari ketiga grafik di atas dapat dilihat komitmen gagasan dari bantuan luar negeri China sesuai yang dituliskan dalam China's aid white paper di mana China terus meningkatkan skala kerja sama pembangunan internasionalnya, dengan memberikan prioritas tinggi kepada negara-negara kurang berkembang di Asia dan Afrika, salah satunya Ghana, serta negara-negara berkembang yang berpartisipasi dalam Belt and Road Initiative.

B. *Interest* (Kepentingan)

Kebijakan luar negeri China secara keseluruhan berpusat pada kebutuhan untuk merestrukturisasi 'mesin' negara, dan membentuk parastatal baru, seperti bank untuk memajukan kepentingan negara di luar negeri (Lam, K. N, 2017) dan pentingnya memperkuat "soft power" di komunitas internasional. Hal ini semakin nyata dengan meningkatnya globalisasi, yang memperkenalkan persaingan di antara sejumlah aktor dengan kepentingan yang sama sebagai kekuatan baru dalam tatanan internasional. Berbagai elemen dalam lingkaran kebijakan luar negeri China telah lama mendukung peningkatan interaksi dengan pemain baru dan mapan dalam memenuhi kepentingannya (Tan-Mullins, M., et al., 2017). Pada dasarnya, pergeseran pendekatan kebijakan luar negeri China mencerminkan diversifikasi sumber pasokan sumber daya dan perubahan status akibat kerentanan sumber dayanya (Mawdsley, 2017). Hal ini melibatkan pembentukan ikatan strategis dengan berbagai negara, termasuk Ghana. Shinn dan Eisenman (2012) mengakui dinamika hubungan China-Afrika sebagai hal yang tak tertandingi dalam hal luas, intensitas berdasarkan volume dimensi

finansial dan ekonomi, kecepatan dan dampaknya. Hal ini didukung oleh Chipaike dan Bischoff (2018) yang menyatakan bahwa China sebagian besar memberikan bantuan ke Afrika untuk memajukan kepentingan China. Adovor Tsikudo (2019) berpendapat bahwa program infrastruktur China, termasuk di Ghana, untuk memenuhi kepentingan China dalam meraih citra baik di ranah internasional dan eksploitasi sumber daya.

Ketika lahan untuk proyek Bui ditandatangani pada tahun 2007, hal ini merupakan investasi China yang paling signifikan di Ghana. Itu juga merupakan investasi asing langsung tertinggi kedua di Ghana setelah Bendungan Akosombo. Dengan biaya sebesar \$790 juta, bendungan ini memiliki semua yang dibutuhkan China untuk membangun citra positif. Ketika konstruksi dimulai pada tahun 2006, Ghana tidak menghasilkan cukup listrik. Kekurangan menyebabkan penjatahan. Pemerintah menggembar-gemborkan bendungan sebagai solusi permasalahan ini. Pembangunan tersebut juga menjanjikan penciptaan 4.000 lapangan kerja dan transformasi sosial ekonomi. Hubungan China dengan negara-negara Afrika sendiri diawali dari Konferensi Asia-Afrika di Bandung 1955. Sejak saat itu, China memperkuat kerja samanya dengan Afrika, baik di bidang ekonomi maupun politik, didorong dengan yang dinamakan oleh simbolisme dari non-blok atau ketidakberpihakan. China melalui kerja sama ekonominya yang sukses menyediakan dukungan material, teknis, dan moral untuk gerakan pembebasan Afrika pada saat periode pasca-kolonial dan pembongkaran apartheid. Hal ini terikat oleh prinsip-prinsip soft-power dan strategi besar (hegemoni budaya) (Nye, 1990). Terlepas dari kesamaan ideologi antara Ghana dan China-kepentingan bersama dalam perjuangan melawan kolonialisme dan imperialisme-hubungan antara kedua negara tidak didasarkan pada ideologi di mana yang mengikat hubungan keduanya adalah investasi dan perdagangan. Oleh karena itu, motif ideologis dan geopolitik terus mendorong keterlibatan kedua negara, dan terdapat pergeseran ke arah kerja sama ekonomi dan teknis (Davies, 2008).

Penulis berargumen bahwa pencarian minyak dan gas alam serta kebutuhan mendesak untuk memperluas pasar produk industri mencapai puncaknya dengan menata ulang lembaga-lembaga utama negara China dalam kerangka model pembangunan ekonomi China. Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan menjalankan industrinya, China meningkatkan hubungannya dengan semua negara yang memiliki sumber energi, salah satunya adalah Ghana. Saat ini, China adalah mitra dagang utama Ghana dengan perkiraan nilai perdagangan sekitar 6 miliar dolar AS (Odoom, 2015). China juga menjadi satu-satunya negara yang telah mendaftarkan sekitar 793 perusahaan di Ghana dengan total nilai investasi sekitar 2 USD miliar (GIPC, 2017). Sementara itu, bantuan pembangunan China meningkat dengan penekanan besar pada penyediaan infrastruktur, seperti jalan, gedung pemerintah, barak militer, sekolah, bendungan, serta infrastruktur gas dan energi. Berbagai saluran interaksi seperti perdagangan, bantuan pembangunan, dan investasi secara teori mungkin tampak mudah dan lugas, namun dalam praktiknya hal ini jauh berbeda dengan apa yang ada dalam kenyataan jika menyangkut hubungan dengan China. Filosofi ekonomi win-win lebih dari sekedar interaksi dengan Ghana. Penulis melihat bagaimana China menggunakan proyek ini untuk mengembangkan soft-power. Ilmuwan politik Amerika Joseph Nye menggambarkan soft-power sebagai kemampuan suatu negara untuk membujuk negara lain agar menginginkan apa yang diinginkannya. Soft-power suatu negara dapat berasal dari budaya, nilai-nilai politik, dan kebijakan luar negerinya. Penulis menyimpulkan bahwa memang proyek tersebut memfasilitasi perluasan pasar oleh perusahaan-perusahaan China pada dekade-dekade berikutnya. Ini termasuk Sinohydro, Shanghai Corporation dan China International Water and Electric Corporation. Penulis juga

menemukan bahwa soft-power bersifat produktif pada tingkat makro seperti peningkatan interaksi antar pemerintah. Kesimpulannya kepentingan China dalam proyek ini adalah menjalankan komitmennya sesuai dengan white paper aid, memenuhi public goods sebagai negara superpower baru, membuka pasar, dan mengeksploitasi sumber daya alam yang dimiliki Ghana, salah satunya adalah biji kakao.

C. Institution (Institusi) & Organization (Organisasi)

Institusi pemerintah mengacu pada entitas pemerintah negara yang membantu China dalam menyelesaikan kebijakan bantuan luar negerinya. Organisasi dalam teori bantuan luar negeri Lancaster terdiri dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas bantuan luar negeri suatu negara. Penulis menggabungkan kedua faktor ini dikarenakan tidak banyaknya pihak yang terlibat dalam pemberian bantuan China ke Ghana melalui proyek bendungan Bui. Selain itu, ada keselarasan antara kedua faktor ini dalam konteks proyek bendungan Bui di Ghana oleh China. Seperti disebutkan sebelumnya, pendekatan China terhadap bantuan berbeda dengan penyedia bantuan Western karena preferensi China terhadap bantuan teknis dan pinjaman. Secara luas dikatakan bahwa pada saat itu China belum memiliki lembaga bantuan pusat yang mana beda dengan saat ini China telah memiliki CIDCA. Program bantuan China di Ghana ini diselenggarakan oleh Departemen Bantuan Luar Negeri di Kementerian Perdagangan (MOFCOM), yang bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri (Brautigam, 2009).

Departemen Bantuan Luar Negeri China yang menjalankan program hibah, pinjaman tanpa bunga, program sukarelawan pemuda, dan bantuan teknis China. Di bawah arahan Kementerian Perdagangan, Bank Ekspor-Impor China (China Exim Bank) mengelola program pinjaman bantuan luar negeri lunak China dengan menggunakan subsidi dari anggaran bantuan luar negeri untuk melunakkan persyaratan pinjaman lunaknya.

Stakeholder	Key tasks
Ministry of Energy (MoE)	Responsible for <ul style="list-style-type: none"> Strategic oversight
Bui Power Authority	<ul style="list-style-type: none"> Day-to-day planning, execution and managing of project Implementing resettlement scheme
Coyne et Bellier	<ul style="list-style-type: none"> Developing dam design
Environmental Resources Management (ERM)	<ul style="list-style-type: none"> Carrying out environmental and social impact assessment
China Exim Bank	<ul style="list-style-type: none"> Providing loans for project
Sinohydro	<ul style="list-style-type: none"> Executing envisaged dam structure

Gambar 4. Tabel pemangku kepentingan dalam proyek Bui Dam Ghana.

Gambar tabel diatas menunjukkan pemetaan tanggung jawab pemangku kepentingan dan terdapat enam pihak yang berperan penting dalam pembangunan proyek ini, diantaranya adalah Kementerian Energi Ghana, yang bertanggung jawab atas keseluruhan pengawasan strategis dengan catatan bahwa perjanjian pinjaman tidak termasuk dalam tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLH). Perjanjian pinjaman merupakan tanggung jawab dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan ditandatangani oleh Kementerian Keuangan dan China Exim Bank (CEB) (Hensengerth, 2011; 11). Bui Power Authority (BPA) bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan proyek sehari-hari termasuk pelaksanaan skema pemukiman kembali; dua konsultan, mengembangkan desain bendungan serta melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan dan

Sosial. China Exim Bank (CEB), yang sebagian besar mendanai proyek tersebut, serta Sinohydro yang melaksanakannya. Peran China sebagai pemberi dana, melalui CEB, memungkinkan Ghana untuk melakukan pembangunan dengan menggunakan kebijakan nasional dibandingkan harus berlangganan World Bank atau lembaga pemberi dana lainnya (Herbertson, 2012; 35).

China Exim Bank adalah salah satu dari tiga bank kebijakan, bersama dengan China Development Bank, dan China Agricultural Development Bank, yang didirikan pada tahun 1994 agar pemerintah dapat membiayai secara langsung tujuan pembangunannya saat negara tersebut bertransisi ke ekonomi pasar. Seperti yang diungkapkan oleh seorang analis China, "kebijakan pinjaman sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan tidak sepenuhnya mematuhi aturan pasar" (Institute of Economic and Resource Management, 2003; 129). Proyek ini dibangun oleh Sinohydro, pengembang bendungan terbesar di dunia dengan dugaan pangsa pasar global lebih dari 50 persen (Verhoeven, 2015; 178) dan dibiayai oleh China Exim Bank (CEB), pemberi dana infrastruktur terbesar di Afrika (Le Belzic, 2012), termasuk program penyediaan air minum. Menurut Fitch Ratings, China Exim Bank meminjamkan USD 67,2 miliar kepada negara-negara di Afrika Sub-Sahara dari tahun 2001 hingga 2010, USD 12,5 miliar lebih banyak dibandingkan Bank Dunia pada periode waktu yang sama. Seharusnya, 20 persen dari total volume bisnis China Exim Bank saat ini berhubungan dengan Afrika; total 17 proyek bendungan di Afrika saat ini dibiayai oleh CEB (Kirchherr, J., et al., 2016).

OECD (2012; 50) sudah menunjukkan bahwa "investasi infrastruktur China telah membantu mengembangkan infrastruktur, yang mungkin tidak memiliki akses terhadap pendanaan pasar atau bahkan pendanaan donor yang cenderung berfokus pada sektor sosial." Awalnya, total biaya proyek Bendungan Bui diperkirakan mencapai USD 622 juta (International Rivers, 2015). Pendanaan sebesar USD 562 juta disediakan oleh CEB, sedangkan USD 60 juta disediakan melalui investasi pemerintah Ghana (Hensengerth, 2011; 37). Pada akhirnya, diperlukan dana tambahan sebesar USD 168 juta untuk penyelesaian akhir proyek yang merupakan pembengkakan anggaran sebesar 27%. Kebutuhan dana tambahan ini kembali disediakan oleh China Exim Bank (Kunateh, 2011).

Efektivitas Bantuan Luar Negeri China melalui Proyek Bendungan Bui di Ghana

Setelah mengidentifikasi bantuan luar negeri China melalui proyek bendungan Bui di Ghana menggunakan faktor-faktor bantuan luar negeri Lancaster, penulis melanjutkan analisis penelitian menggunakan efektivitas bantuan luar negeri berdasarkan prinsip-prinsip Aid Effectiveness Paris Declaration 2005 untuk menjawab pertanyaan besar penelitian dari jurnal ini.

A. Policy Ownership

Prinsip ini mengharuskan bagi negara dunia ketiga, sebagai negara penerima bantuan, untuk memiliki kebijakan dan strategi pembangunannya sendiri, serta mengelola usaha pembangunan mereka di lapangan. Skema dari proyek pembangunan hydropower di Ghana telah direncanakan sejak tahun 1978, berarti sejak lama pemerintahan Ghana memiliki perencanaan strategi pembangunan khusus pada sektor energi dan memiliki kebijakan yang mendukungnya. Pada era pemerintahan Kufuor tahun 2001 - 2009, ia memiliki kebijakan dan ciri khas politik luar negeri yang disalurkan sejalan dengan diplomasi ekonomi. Ia menyediakan lingkungan yang kondusif dan mendukung bagi investor asing dan dengan demikian menandai masa jabatannya sebagai "Zaman Keemasan Bisnis." Landasan

pemerintahannya adalah mendorong pembangunan melalui sektor swasta. Pada sub-bab ini akan lebih fokus pada kebijakan pembangunan yang Ghana miliki sebelum tahun 2008 tahun dimulainya pembangunan bendungan Bui.

Kebijakan dan program Kufuor sebagian besar diarahkan pada peningkatan perekonomian bangsa dengan menggunakan strategi ekonomi dan bisnis seperti membuka peluang baru dalam perdagangan, investasi, bantuan dan pasar yang lebih maju (Yeboah, 2019). Memang benar, gambarannya mengenai masa jabatannya sebagai masa keemasan bisnis memberikan contoh dan menekankan kembali komitmennya dalam menyambut globalisasi dan tren baru peningkatan ekonomi. Di masa pemerintahan Kufuor, Ghana juga banyak mengeksekusi proyek-proyek pembangunan yang melibatkan pihak eksternal dalam pembiayaannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan proyek pembangunan sungai Volta dan bendungan Akosombo yang sebelumnya telah berfungsi sebagai tempat produksi listrik serta membangun perekonomian Ghana (Yeboah, 2019). Perlu dicatat juga proyek bendungan Bui Ghana ini, seperti yang telah disebutkan di atas, telah direncanakan sejak 1978, namun pada akhirnya berhasil dieksekusi pada era Kufuor di mana kebijakan domestik maupun luar negeri diarahkan kepada pembangunan melalui investasi, bantuan luar negeri, dan lain sebagainya (Yeboah, 2019). Selain itu, setiap dilakukannya proyek pembangunan, selalu adanya 'institusi' atau otoritas yang secara langsung dibuat untuk bertanggungjawab dalam keseluruhan proses proyek di mana hal ini menjadi salah satu best-practice dalam efektivitas bantuan luar negeri yang masuk di Ghana pada proyek tertentu. Contoh dari otoritas ini adalah Volta River Authority yang bertanggungjawab atas proyek sungai Volta serta Bui Power Authority yang bertanggungjawab dalam proyek pembangunan bendungan Bui. Bui Power Authority (BPA), bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan proyek sehari-hari termasuk pelaksanaan skema pemukiman kembali.

B. Local Alignment

Prinsip ini mengharapakan bagi para negara pendonor untuk memberikan bantuan sesuai dengan kebijakan dan strategi pembangunan negara recipient, dan apabila memungkinkan harus selalu memprioritaskan lembaga dan institusi lokal dalam pengelolaan bantuan. Berdasarkan yang telah dijelaskan pada analisis prinsip pertama, Ghana telah memiliki perencanaan pembangunan pada sektor energi (hydropower) sejak 1978.

Pada tahun 2006, Ghana tidak memiliki cukup pasokan energi yang dihasilkan sebagai listrik. Dengan ini, pemerintahan Ghana membutuhkan energi terbarukan hydropower sebagai salah satu pemasok energi listriknya. China memberikan pendanaan bantuan luar negerinya pada sektor hydropower proyek bendungan Bui dapat disimpulkan telah selaras dengan kebijakan dan strategi yang dimiliki oleh Ghana. Sejarah Bendungan Bui dimulai pada tahun 1925 ketika lokasinya pertama kali dianggap menjanjikan untuk sebuah bendungan. Pada tahun 1978, rencana pembangunan Bendungan Bui telah mencapai tahap perencanaan lanjutan, dengan keterlibatan Australia dan Bank Dunia. Namun, empat kudeta membuat implementasinya menjadi mustahil (Hensengerth, 201; 9). Bendungan Bui kini menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar kedua di Ghana dengan perkiraan kapasitas 400 MW, hanya dilampaui oleh Bendungan Akosombo dengan kapasitas 1.020 MW (Volta River Authority, 2015).

Bersama dengan Bendungan Kpong yang berkapasitas 160 MW, Bendungan Bui dan Bendungan Akosombo di Ghana merupakan satu-satunya pembangkit listrik tenaga air di

Ghana. Ketiga pembangkit listrik ini bersama-sama menyumbang lebih dari 50 persen total kapasitas terpasang Ghana sebesar 2.936 MW (Khalil, 2015). Kekurangan energi di Ghana pada tahun 1990an memuncak pada krisis nasional, yang memicu rencana pembangunan bendungan Bui. Intervensi China terhadap bendungan pembangkit listrik tenaga air Bui sangat penting dalam mengalihkan proyek dari tahap perencanaan dan desain ke tahap konstruksi. Tawaran ini dianggap sebagai langkah terdepan dalam mengatasi krisis energi di Ghana dan sebagai hasilnya diperingati oleh Pemerintah Ghana. Dapat disimpulkan pendanaan bantuan luar negeri yang diberikan oleh China dalam proyek bendungan Bui ini telah selaras dengan kebijakan, perencanaan pembangunan, hingga kebutuhan lokal Ghana.

C. Harmonization

Prinsip ini mewajibkan bagi para donor untuk melakukan koordinasi dalam pemberian bantuan kepada negara berkembang sebagai recipient, agar bantuan yang ada tidak tumpang tindih dan menyulitkan pemerintah negara penerima bantuan. Sesuai dengan penjelasan pada bagian analisis institusi dan organisasi di atas, telah adanya skema pemangku kepentingan yang memiliki tugas masing-masing dan mempermudah koordinasi dalam proyek pembangunan bendungan dam pada tahun 2008 silam. Sinohydro, sebagai kontraktor konstruksi, tidak terlibat dalam Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) mengenai Bendungan Bui maupun dalam pelaksanaan skema pemukiman kembali. Satu-satunya tugas Sinohydro dalam proyek ini adalah melaksanakan desain bendungan (Amo-Agyemang, 2021). Keterlibatan Sinohydro dalam proyek melalui kontrak konstruksi, bukan perjanjian kontrak dengan peran dan tanggung jawab tambahan kemungkinan besar memang dimaksudkan oleh perusahaan.

Tantangan terbesar bagi pengembang bendungan yang pergi ke luar negeri adalah kurangnya jaringan di negara baru tempat mereka beroperasi (Amo-Agyemang, 2021). Oleh karena itu, diperlukannya melibatkan pemain tambahan, khususnya mereka yang memiliki pengalaman lokal, merupakan jalur yang dipilih oleh pengembang bendungan untuk mengatasi kurangnya jaringan mereka di negara tuan rumah. Melalui kontrak konstruksi, Sinohydro dapat fokus pada bidang terbaiknya—membangun bendungan. Dengan ini, CEB dan Bui Power Authority mengambil peran aktif dalam kebijakan perlindungan sosial dalam proyek bendungan Bui di Ghana. Menurut pedoman internalnya, Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) harus sudah dilaksanakan sebelum proyek bendungan apapun agar dapat didanai. Selain itu, CEB seharusnya memantau secara berkala apakah rekomendasi ESIA diterapkan dalam praktiknya (OECD, 2008; 190). Dalam kasus Bendungan Bui, penulis tidak menemukan bukti bahwa CEB melakukan pengawasan khusus. Pengawasan terbatas mungkin diperlukan dalam hal apa pun. ini bisa dikaitin sama yang institusi dan organisasi yang bertanggung jawab dalam proyek ini baik dari China dan Ghana sehingga menciptakan rasa memiliki pada keduanya. Meskipun China Exim Bank menyediakan pendanaan untuk proyek tersebut, Bui Power Authority (BPA) sebagai badan publik bertanggung jawab penuh untuk mengawasi konstruksi dan mengelola kinerja kontraktor utama, Sinohydro Corporation Limited (Cooke, et al., 2015; Otoo, et al., 2013). Karena kontraktor EPC, Sinohydro hanya bertanggung jawab atas pembangunan bendungan, namun permasalahan resettlement menjadi tanggung jawab BPA dibantu oleh CEB sebagai inisiatifnya dalam realisasi proyek pembangunan bendungan Bui. BPA menyiapkan Kamp Bui yang menampung sebanyak tujuh

desa ditambah personel Taman Nasional Bui yang mana seluruh warga ini harus dimukimkan kembali (Hensengerth, 2017; 6).

D. Managing for Result

Prinsip ini adalah prinsip yang mewajibkan semua pihak yang berpartisipasi dalam bantuan untuk mengutamakan dan memperhatikan hasil dari bantuan tersebut, tidak hanya sekedar penyaluran teknis, melainkan mengembangkan metode, alat dan mekanisme untuk mengetahui apakah bantuan tersebut benar-benar memiliki hasil yang positif bagi kehidupan masyarakat penerima. Sejak dibuatnya skema pembangunan bendungan Bui ini dibangun dengan tujuan utama pembangkit listrik dan penyediaan air, lebih tepatnya proyek ini dirancang untuk menghasilkan listrik sebesar 400 megawatt dan meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi (Odoom, 2015; Gottschalk, 2011). Sebelum adanya proyek ini, Pemerintah Ghana bersumbar bahwa pembangunan bendungan pembangkit listrik tenaga air Bui akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Menurut pernyataan pemerintah pada upacara pemotongan tanah pada tahun 2007, bendungan pembangkit listrik tenaga air Bui diharapkan dapat menyediakan lapangan kerja bagi 3.400 pekerja terampil dan tidak terampil di Ghana (Adovor Tsikudo, 2019). Selain itu, bendungan Bui juga terdiri dari skema irigasi yang diharapkan dapat menyediakan air untuk lahan seluas 30.000 hektar, 32 km timur laut bendungan (Water Technology, 2015; Stocks, 2014). Dari ambisi di atas, proyek bendungan Bui telah berhasil mencapai tujuan tersebut. Bendungan ini setelah selesai dibangun pada tahun 2013 menghasilkan listrik sekitar 400MW dan memfasilitasi irigasi sekitar 30.000 hektar lahan. Proyek Bui dianggap berperan penting dalam agenda pembangunan negara dan berfungsi sebagai sarana bagi bisnis swasta untuk berkembang. Di bidang pasokan listrik, pembangkitan listrik di Bui diperkirakan akan meningkatkan kapasitas pembangkitan negara tersebut sekitar 20% dan meningkatkan keandalan dan keamanan pasokan listrik ke bagian utara Ghana. Sekali lagi, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas penyediaan layanan listrik di Wilayah Brong Ahafo, Utara, Timur Atas, dan Barat Atas negara tersebut. Danau yang terbentuk akibat bendungan Bui ini bertujuan untuk meningkatkan sumber daya perikanan di Sungai Black Volta dan meningkatkan hasil panennya. Ghana juga memasok sebagian pembangkit listriknya ke negara-negara tetangga, sehingga menjadi sumber devisa negara. Motivasinya memang didasarkan pada pandangan bahwa pembangunan bendungan akan mempercepat upaya Ghana mencapai kemandirian ekonomi.

Dari skema irigasi yang diharapkan dapat menyediakan air untuk lahan seluas 30.000 hektar, 32 km timur laut bendungan berarti setara dengan luas wilayah 7,3 persen Distrik Tain di Ghana, tempat proyek tersebut berlokasi (Tawiah, 2015). Dengan asumsi hasil panen padi rata-rata tahunan sebesar 5,75 ton/hektar (FAO, 2015) dan rata-rata konsumsi beras per kapita sebesar 28 kg/tahun di Ghana (FAO, 2013; 7), maka wilayah tersebut yang diprakarsai oleh Bendungan Bui mungkin mampu memberi makan sekitar 6.200 orang, 6 persen dari total penduduk Distrik Tain, dan ini merupakan kontribusi yang signifikan. Namun, lebih banyak bendungan mungkin diperlukan untuk mengembangkan sektor pertanian Ghana dan meningkatkan ketahanan pangan (Namara et al., 2011; 35.). Saat ini, sekitar 100.000 km² wilayah negara ini (42 persen) dapat ditanami. Namun, luas lahan yang saat ini ditanami hanya seluas 11.400 km², yang merupakan 11,4 persen dari luas lahan yang dapat ditanami (FAO, 2015). Meskipun terdapat ekspektasi yang besar seputar pemberdayaan tenaga kerja, temuan penelitian dari Kongres Serikat Buruh Ghana (TUC), BPA, dan Sinohydro mengungkapkan

bahwa proyek bendungan pembangkit listrik tenaga air Bui hanya mempekerjakan 1.836 orang pada masa puncak konstruksi (Otoo, et al., 2013). Secara statistik, 1.676, atau 91% pekerjanya adalah warga Ghana, yang bekerja sebagai pengrajin, seperti tukang listrik, tukang kayu, dan tukang batu (Adovor Tsikudo, 2019). Yang lainnya bekerja sebagai buruh lepas, termasuk pekerja berupah harian, pengemudi, dan penjaga keamanan (Adovor Tsikudo, 2019). Angka 9% dari fraksi tersebut terdiri dari kuota ekspatriat yang diberikan kepada kontraktor dan kelompok ini terdiri dari warga China dan Pakistan yang bekerja sebagai insinyur, tukang las, dan pembengkok baja (Adovor Tsikudo, 2019). Masuknya tenaga asing dalam proyek ini juga sebenarnya didukung oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Ghana sendiri. Undang-undang ketenagakerjaan di Ghana mengamankan pengusaha untuk mengizinkan pekerjanya membentuk serikat pekerja karena serikat pekerja berfungsi sebagai kekuatan negosiasi kolektif dan mengupayakan kesejahteraan para anggotanya.

Angka 91% pemetaan bagi tenaga kerja warga Ghana merupakan angka yang cukup baik, namun ada beberapa kecacatan dalam pengelolaan tenaga kerja ini yang perlu dielaborasi. Pekerja proyek menyuarkan beberapa keluhan mereka dan mengajukan beberapa pertanyaan seperti buruknya ventilasi, yang berasal dari kebijakan yang mewajibkan 14 orang untuk menempati satu ruangan. Secara signifikan, kekhawatiran lain yang muncul terkait dengan sanitasi di lokasi yang membedakannya berdasarkan kebangsaan (Adovor Tsikudo, 2019). Diskriminasi juga merupakan masalah serius lainnya. Para pekerja mengeluhkan fakta bahwa rekan-rekan mereka dari China diberikan kamar yang dilengkapi dengan Air Conditioner (AC), namun mereka tidak memilikinya. Mereka juga menyampaikan keluhannya atas buruknya kondisi keselamatan di lokasi. Hal ini termasuk kurangnya sepatu baja di lokasi kerja. Para pekerja juga mengeluhkan kerja lembur tanpa imbalan apapun (Adovor Tsikudo, 2019). Undang-undang ketenagakerjaan di Ghana menekankan jadwal kerja delapan jam per hari (Otoo, et al., 2013). Oleh karena itu, waktu yang dihabiskan setelah waktu tersebut dianggap sebagai waktu lembur. Dalam hal ini, pemberi kerja dan pekerja harus menegosiasikan jumlah yang akan dibayarkan jika pekerja bekerja selama delapan jam. Faktanya, para pekerja di bendungan pembangkit listrik tenaga air Bui mengaku bahwa mereka dipaksa bekerja 9 jam sehari, sepanjang hari dalam seminggu tanpa upah lembur (Adovor Tsikudo, 2019).

Hal ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Ghana khususnya, perlunya dilakukan penegakan hak buruh terhadap kedua belah pihak, yaitu pemerintah Ghana serta Sinohydro sebagai kontraktor yang mempekerjakan. Selain itu, dibutuhkan juga persatuan buruh sebagai salah satu upaya perlindungan buruh dari hal-hal yang sifatnya diskriminasi dan pengambilan hak lainnya. Akibatnya, pada tahun 2009 sebuah serikat pekerja lokal dibentuk di Bui dan sebuah perjanjian ditandatangani antara Sinohydro dan Serikat Pekerja Bahan Bangunan dari Kongres Serikat Buruh Ghana (TUC), yang bertindak sebagai pengganti para pekerja Ghana (Adovor Tsikudo, 2019). Pembangunan proyek bendungan pembangkit listrik tenaga air Bui memerlukan investasi sosial dan infrastruktur dalam jumlah besar sehingga pendanaan eksternal harus dicari secara aktif (Chipaike & Bischoff, 2018). China Exim Bank membiayai proyek ini melalui pinjaman lunak sebesar USD 270 m, pinjaman komersial sebesar USD 292 m, dan pendanaan sebesar USD 60 m dari Pemerintah Ghana (Chipaike & Bischoff, 2018). Selain itu, kedua pinjaman tersebut ditawarkan dengan masa tenggang selama lima tahun dan masa amortisasi selama 20 tahun. Pembiayaan proyek bendungan Bui dijamin melalui penjualan ekspor biji kakao (Chipaike & Bischoff, 2018). Secara keseluruhan, proyek pembangkit listrik

Bui bersifat strategis untuk meningkatkan pembangunan sosio-ekonomi di tingkat lokal dan nasional. Berdasarkan perjanjian ini, hasil produksi kakao sebesar 30.000 ton per tahun diekspor ke China, dan ditempatkan di rekening escrow di Bank Exim untuk dijadikan jaminan atas pinjaman tersebut.

E. Mutual Accountability

Pada prinsip ini, para donor dan negara berkembang harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana dan pelaksanaan bantuan secara transparan satu sama lain, kepada masyarakat, serta parlemen mengenai dampak dan hasil dari bantuan tersebut. Hal ini menjadi penting dikarenakan kurangnya transparansi dapat menyebabkan kegagalan suatu proyek, contoh pada tahun 2004 terjadi protes besar-besaran terhadap infiltrasi China di Dakar, Senegal dengan beberapa pengunjung rasa menyerukan presiden negara tersebut untuk mengusir orang China dari negara tersebut dan Nigeria serta Angola membatalkan kontrak bernilai miliaran dolar dengan China (Habia, J.K., 2009). Hal ini disebabkan oleh kurangnya transparansi yang dilakukan China dalam menangani negosiasi dan menjalankan bisnis terkait konten Afrika. Pada proyek pembangunan bendungan Bui di Ghana, telah dilakukannya upaya-upaya transparansi sebagai pembelajaran dari proyek Akosombo di tahun 1965, baik yang dilakukan oleh pihak China maupun pemerintahan Ghana. Kementerian Energi dan Sekretariat Pembangunan Bui (BDS), keduanya dari Ghana menandatangani perjanjian dengan China (China Exim Bank dan Sinohydro) atas nama Ghana untuk membangun bendungan pembangkit listrik tenaga air di Bui yang akan menghasilkan 400 megawatt (MW) listrik untuk negara.

China berkomitmen untuk memberikan pinjaman dan hibah sebesar \$1 miliar untuk Bendungan Bui dan proyek pembangunan lainnya di Ghana. Perjanjian tersebut dipecah menjadi tujuh paket keuangan berbeda yang meliputi pendidikan, kesehatan, pembangunan bendungan Bui, dan bidang kerjasama teknis, yang nantinya akan ditentukan oleh kedua pihak. Lima dari tujuh perjanjian ditandatangani antara pemerintah Ghana dan pemerintah China dan dua sisanya ditandatangani antara Exim Bank dan pemerintah Ghana (Habia, J.K., 2009). Dari informasi ini dapat dilihat bahwa adanya usaha transparansi antara kedua belah pihak dalam pengaturan ekspektasi dan perencanaan perjanjian pada proyek bendungan Bui.

Menteri Keuangan dan Perencanaan Ekonomi, Kwadwo Baah Wiredu dari Ghana dan Fu Ziyang, Wakil Menteri Perdagangan Republik Rakyat China pada tanggal 3 September 2008 menandatangani perjanjian kontrak bagi China untuk memberikan pinjaman dan hibah sebesar \$1 miliar menuju proyek Bendungan Bui. Dari jumlah total tersebut, \$526 juta akan dialokasikan untuk proyek bendungan Bui (Habia, J.K., 2009).

Pinjaman senilai \$526 juta, yang dikenal sebagai Perjanjian Pinjaman Kredit Pembeli antara Exim Bank of China dan pemerintah Republik Ghana, untuk proyek Bui diserahkan di Gedung Parlemen di hadapan Komite Keuangan Parlemen untuk dipertimbangkan dan disetujui, sesuai dengan pasal 181 ayat (3) UUD 1992 (Habia, J.K., 2009). Perjanjian pinjaman dengan China juga mengharuskan Kementerian Energi untuk menandatangani Perjanjian Pembelian Listrik dengan Perusahaan Listrik Ghana (ECG) untuk pembelian energi yang akan dihasilkan dari pembangkit listrik Bui. Untuk sementara, harga dipatok pada kisaran 3,5 - 5,5 sen AS/KWh. Dengan menghubungkan Kementerian Energi dengan Perusahaan Listrik Ghana adanya supervisor dari pihak lain sehingga meminimalisir terjadinya kecurangan dan pematihan komitmen.

Persyaratan pinjaman dengan China Exim Bank juga mengharuskan Ghana Cocoa Board dan Genertec International Corporation of Beijing untuk menandatangani Perjanjian Penjualan Kakao (CSA) yang mana 30.000 metrik ton biji kakao tanaman utama Ghana akan dialokasikan ke Genertec International Corporation per tahun panen sebagai bagian dari upaya untuk menyediakan uang tunai untuk membayar utang. Perjanjian Penjualan Kakao akan berlaku untuk jangka waktu 20 tahun, yang berlaku sepanjang jangka waktu pinjaman. Selain transparansi antara pihak pemerintahan Ghana dengan pihak China, perlu adanya transparansi terhadap masyarakat, salah satunya upaya melibatkan komunitas di masyarakat. Kementerian Energi Ghana mengontrak Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan (ERM) untuk melakukan studi Penilaian Dampak Lingkungan dan Sosial terhadap proyek pembangkit listrik tenaga air Bui untuk menilai potensi dampak yang terkait dengan pembangunan bendungan Bui. Studi ini diharapkan dapat menghasilkan Laporan Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (ESIA), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) dan Kerangka Perencanaan Pemukiman Kembali untuk diterapkan selama pembangunan bendungan yang sebenarnya.

Sebuah tim yang terdiri dari enam mahasiswa spesialis dari Universitas Sains dan Teknologi Kwame Nkrumah dan Universitas Cape Coast di Ghana melakukan survei sosial terperinci di wilayah proyek Bui mengenai bendungan yang akan dibangun, selama jangka waktu lima minggu mengenai permasalahan pembangunan bendungan Bui (Habia, J.K., 2009). Sekretariat Pembangunan Bui dan Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan juga mengadakan pertemuan nasional dan lokal untuk membahas ESIA proyek pembangkit listrik Bui. Salah satu pertemuan nasional yang dikenal sebagai Pertemuan Nasional Pemangku Kepentingan diadakan di Accra pada tanggal 25 April 2006, melibatkan 121 peserta dari LSM, media, layanan publik, akademisi dan sektor swasta untuk membahas potensi dampak lingkungan dan sosial dari proyek pembangkit listrik Bui dan bagaimana hal tersebut harus ditangani (Habia, J.K., 2009). Beberapa audiensi publik lokal juga diadakan di wilayah proyek bendungan Bui, untuk memberikan informasi kepada kelompok kepentingan tentang proyek tersebut, menentukan isu-isu yang menjadi perhatian khusus dan memberikan umpan balik mengenai temuan-temuan ESIA. Pada tanggal 28 Agustus 2006 diadakan audiensi publik dengan para kepala suku dan warga Banda Ahenkro dan Bungasi di Wilayah Brong Ahafo untuk membahas agenda di atas (Habia, J.K., 2009). Hal ini dengan jelas menggambarkan bahwa pemerintah Ghana telah melakukan berbagai hal untuk mencapai transparansi skema pembangunan bendungan Bui ke berbagai kalangan warga Ghana demi kesuksesan proyek, baik dari sisi pembangunan maupun sisi sosialnya.

4. Simpulan

Ghana telah menunjukkan kepemilikan kebijakan yang kuat dalam perencanaan sektor energi sejak lama, terutama dengan pendekatan kebijakan luar negeri yang mendukung pembangunan melalui investasi dan bantuan luar negeri. Selaras dengan kebijakan lokal, bantuan China dalam proyek bendungan Bui telah terkoordinasi dengan baik, memperhatikan kebutuhan lokal dan strategi pembangunan Ghana dalam sektor energi, terutama dalam memenuhi kebutuhan energi terbarukan. Meskipun ada tantangan terkait koordinasi dan pengawasan tertentu, proyek ini berhasil memberikan hasil yang signifikan: meningkatkan kapasitas pembangkit listrik, menyediakan irigasi untuk pertanian, dan memberikan lapangan kerja bagi warga Ghana, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan terkait hak buruh, keamanan kerja, dan transparansi.

Transparansi yang diterapkan oleh pemerintah Ghana dalam menandatangani perjanjian dengan China, melibatkan komunitas, dan menyelenggarakan pertemuan publik adalah langkah positif dalam memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan proyek ini. Dengan demikian, proyek bendungan Bui termasuk cukup efektif dalam efektivitas bantuan luar negeri yang berpijak pada prinsip Paris Declaration, namun tetap memperlihatkan ruang untuk perbaikan yang berkelanjutan dalam hal transparansi, hak buruh, dan pengawasan proyek. Meskipun demikian, penulis juga menemukan hal-hal yang perlu dievaluasi. Pemerintah Ghana harus lebih transparan terhadap kontrak-kontrak pembangunan besar di masa depan dengan membuka proses penawaran, karena hal ini akan membantu menciptakan persaingan yang sehat dan juga menghasilkan negosiasi yang hati-hati terhadap proyek-proyek yang benar-benar akan menghasilkan situasi saling menguntungkan dan menghentikan persaingan gagasan negosiasi pintu tertutup. Akan sangat membantu juga jika pemerintah Ghana dapat membuat turnkey dan perjanjian kontrak bendungan Bui dapat diakses oleh publik sehingga lembaga independen dan akademisi dapat melakukan evaluasi mereka sendiri dan membuat rekomendasi yang tidak mengikat, karena evaluasi independen ini mampu menangkap hal-hal tertentu.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah berkenan bekerjasama selama penelitian ini.

6. Pernyataan *Conflicting Interests*

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan penelitian, kepengarangan, dan/atau publikasi dari artikel ini

References

- Adovor Tsikudo, K. (2019). *The state's role and synergies in China-Africa engagements: The case of Ghana's Bui hydropower dam* [Doctoral dissertation, University of Minnesota].
- Amo-Agyemang, C. (2021). The role of the state in Sino-Ghanaian relations: The case of Bui hydroelectric dam. *Cogent Social Sciences*, 7(1), 1–20. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1888674>
- Brautigam, D. (2009). *The dragon's gift: The real story of China in Africa*. Oxford University Press.
- Briggs, R. C. (2017). Does foreign aid target the poorest?. *International Organization*, 71(1), 187–206. <https://doi.org/10.1017/S0020818316000386>
- Chipaike, R., & Bischoff, P. H. (2018). A challenge to conventional wisdom: Locating agency in Angola's and Ghana's economic engagements with China. *Journal of Asian and African Studies*, 53(2), 1–16. <https://doi.org/10.1177/0021909618756435>
- Cooke, F., Wood, G., & Horwitz, F. (2015). Multinational firms from emerging economies in Africa: Implications for research and practice in human resource management. *The International Journal of Human Resource Management*, 26(21), 2653–2675. <https://doi.org/10.1080/09585192.2015.1071546>

- Davies, M. (2008). *How China delivers development assistance to Africa*. Centre for Chinese Studies, Department for International Development.
- Habia, J. K. (2009). *The Bui Dam impact on Ghana-China relations: Transparency, accountability and development outcomes from China's Sino Hydro Dam project in Ghana* [Unpublished master's thesis]. Department of Urban Studies and Planning.
- Hensengerth, O. (2011). Interaction of Chinese institutions with host governments in dam construction: The Bui dam in Ghana. *German Development Institute*. http://www.die-gdi.de/uploads/media/DP_3.2011.pdf
- Hensengerth, O. (2017). China's investment in African hydropower: How to govern the water-energy nexus? Evidence from the Bui Dam in Ghana. In G. Siciliano & F. Urban (Eds.), *Chinese hydropower development in Africa and Asia: Challenges and opportunities for sustainable global dam-building* (pp. 35–52). Routledge.
- Herbertson, K. (2012). *Will safeguards survive the next generation of development finance?* Bank Information Center. <http://www.bicusa.org/wp-content/uploads/2012/04/Will+Safeguards+Survive+June+2012.pdf>
- International Rivers. (2015). *Bui Dam, Ghana*. <https://www.internationalrivers.org/resources/bui-dam-ghana-3608>
- Joint Evaluation of the Paris Declaration. (2010). *Phase 2: Final report*.
- Khalil, A. (2015). Ghana: Assessing the sustainability of new hydropower sites. *International Hydropower Association*.
- Kirchherr, J., Disselhoff, T., & Charles, K. (2016). Safeguards, financing, and employment in Chinese infrastructure projects in Africa: The case of Ghana's Bui Dam. *Waterlines*, 35(1), 37–61. <https://doi.org/10.3362/1756-3488.2016.003>
- Kunateh, M. A. (2011, May 10). Bui project needs additional \$168m funding. *The Chronicle*. <http://thechronicle.com.gh/bui-project-needs-additional-168m-funding/>
- Kotsadam, A., Østby, G., Rustad, S. A., Tollefsen, A. F., & Urdal, H. (2018). Development aid and infant mortality: Micro-level evidence from Nigeria. *World Development*, 105, 59–69. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.12.023>
- Lancaster, C. (2008). *Foreign aid: Diplomacy, development, domestic politics*. University of Chicago Press.
- Lam, K. N. (2017). *Chinese state-owned enterprises in West Africa: Triple-embedded globalization*. Routledge.
- Le Belzic, S. (2012). China's Exim Bank: Africa's largest financier looks for an even bigger role. *The Africa Report*. <http://www.theafricareport.com/North-Africa/chinas-exim-bank-africas-largest-financier-looks-for-an-even-bigger-role.html>

- Lema, R., Bhamidipati, P. L., Gregersen, C., Hansen, U. E., & Kirchherr, J. (2021). China's investments in renewable energy in Africa: Creating co-benefits or just cashing in? *World Development*, 141, 1–18. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105365>
- Lynch, L., Andersen, S., & Zhu, T. (2020). *China's foreign aid: A primer for recipient countries, donors, and aid providers*. Center for Global Development.
- Maipose, G. (2009). Botswana: The African success story. In L. Whitfield (Ed.), *The politics of aid: African strategies for dealing with donors* (pp. 71–98). Oxford University Press.
- Mawdsley, E. (2017). Development geography: Cooperation, competition and convergence between “North” and “South.” *Progress in Human Geography*, 41(1), 108–117. <https://doi.org/10.1177/0309132515601776>
- Nye, J. S. (1990). Soft power. *Foreign Policy*, 80, 153–171. <https://doi.org/10.2307/1148580>
- Odoom, I. (2015). Dam in, cocoa out; Pipes in, oil out: China's engagement in Ghana's energy sector. *Journal of Asian and African Studies*, 50(2), 1–23. <https://doi.org/10.1177/0021909615570950>
- OECD. (2012). *Mapping support for Africa's infrastructure investment*. OECD. <http://www.oecd.org/daf/inv/investmentpolicy/MappingReportWeb.pdf>
- OECD. (2022, November 21). *Official development assistance (ODA)*. <https://www.oecd.org/dac/financing-sustainabledevelopment/development-finance-standards/official-development-assistance.htm>
- Otoo, K. N., Ulbrich, M., & Asafu-Adjaye, P. (2013). *Unions can make a difference: Ghanaian workers in a Chinese construction firm at Bui Dam site*. O'Mens Graphix.
- Shinn, D. H., & Eisenman, J. (2012). *China and Africa: A century of engagement*. University of Pennsylvania Press.
- Tan-Mullins, M., Urban, F., & Mang, G. (2017). Evaluating the behaviour of Chinese stakeholders engaged in large hydropower projects in Asia and Africa. *The China Quarterly*, 230, 464–488. <https://doi.org/10.1017/S0305741017000575>
- Tsikudo, K. A. (2021, July 27). How the Bui Dam set up China's future engagement strategy with Ghana. *The Conversation*. <https://theconversation.com/how-the-bui-dam-set-up-chinas-future-engagement-strategy-with-ghana-164970>
- Verhoeven, H. (2015). *Water, civilization and power in Sudan: The political economy of military-Islamist state building*. Cambridge University Press.
- Volta River Authority. (2015). *Akosombo hydro plant*. <https://vra.com/akosombo>

Yeboah, S. A. (2019). Economic diplomacy and national development: Ghana under Kufuor (2001–2008): “Mammon” and good neighborliness. *International Journal of New Economics and Social Sciences*, 2(10), 210–221. <https://doi.org/10.5604/01.3001.0013.4840>